

**KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN TENTANG KISAH
RATU BALQIS
(STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN SAYYID QUTB TAFSIR FI ZHILAL AL-
QUR'AN DAN IBNU ASYUR TAFSIR *AL-TAHRIR WA AL-TANWIR*)**

Fachry Maulana Rivaldi

fachrymaulanarivaldi@gmail.com

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan penafsiran Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* dan Ibnu Asyur dalam *Al-Tahrir wa al-Tanwir* terhadap kisah Ratu Balqis dalam QS. an-Naml ayat 22–44, berfokus pada isu kepemimpinan perempuan dalam Islam dalam eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi Sayyid Qutb dan Ibnu Asyur.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan komparatif-kritis. Teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger meliputi tiga momen dialektis: eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi digunakan sebagai kerangka teori. Data primer menggunakan tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* dan *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, sementara data sekunder berasal dari literatur akademik yang relevan dengan tema kepemimpinan perempuan, tafsir tematik, dan teori konstruksi sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sayyid Qutb dan Ibnu Asyur melihat kepemimpinan perempuan yang didasarkan pada kapasitas rasional, keadilan, kebijaksanaan politik, dan kemampuan musyawarah dalam memimpin guna mengambil keputusan politik sebagai tujuan utama syariat. Kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur'an memberikan ruang interpretasi yang menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan yang dominan terhadap kualitas kepemimpinan seperti kebijaksanaan, rasionalitas, dan keadilan, daripada sekadar faktor jenis kelamin.

Kata Kunci: Ratu Balqis, Sayyid Qutb, Ibnu Asyur, Kepemimpinan Perempuan

A. PENDAHULUAN

Dalam lanskap sosial-keagamaan kontemporer, representasi perempuan dalam kepemimpinan masih menjadi isu yang memantik perdebatan, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Salah satu contoh narasi keislaman adalah kisah Ratu Balqis yang tercatat dalam Surah An-Naml ayat 23. Sosok ini digambarkan Al-Qur'an sebagai seorang pemimpin perempuan yang tidak hanya cerdas secara diplomatik, tetapi juga arif dalam merespons dakwah Nabi Sulaiman. Namun demikian, pembacaan terhadap kisah ini kerap kali dibingkai dalam perspektif maskulin yang mengabaikan signifikansi kepemimpinan Balqis itu sendiri

Sayyid Qutb, seorang pemikir besar Islam abad ke-20, dalam tafsirnya yang monumental *Fi Zhilal al-Qur'an*, turut menafsirkan kisah Ratu Balqis.¹ Meski tafsir ini dikenal dengan pendekatan tematik dan semangat revolusionernya, Qutb tetap menampilkan kecenderungan konservatif dalam membingkai peran perempuan. Dalam konteks ini, penafsirannya terhadap Balqis lebih menekankan pada superioritas Nabi Sulaiman sebagai representasi kepemimpinan laki-laki ketimbang mengakui keistimewaan kepemimpinan perempuan.

Dari pembacaan terhadap tafsir tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah Qutb hanya menyuarakan pandangan teologis semata, ataukah tafsirnya merupakan representasi dari ideologi tertentu, yakni pemikiran Ikhwanul Muslimin yang lekat dengan struktur sosial patriarkal? Hal ini menjadi penting untuk digali karena tafsir Qutb tidak hanya hidup dalam wacana keilmuan, tetapi juga memengaruhi diskursus sosial-keagamaan umat Islam hingga saat ini.²

Di sisi lain, resistensi terhadap kepemimpinan perempuan sering kali mengambil bentuk legitimasi agama, di mana ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan secara literal untuk menegaskan otoritas laki-laki. Narasi ini diperkuat oleh pembacaan tekstual yang cenderung mengabaikan konteks sosial dan semangat keadilan dalam teks wahyu. Ayat-ayat yang secara eksplisit tidak melarang perempuan menjadi pemimpin, justru dipakai untuk menghalangi peran perempuan di ruang publik.³ Lebih jauh lagi, kepemimpinan adalah sebuah tindakan dalam mengarahkan dan memimpin pekerjaan anggota kelompok, yang meliputi tindakan dalam membentuk hubungan kerja, memuji dan mengkritik anggota-anggota dalam kelompok, serta menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan perasaan anggota-anggota yang dipimpinnya.⁴

Di sisi lain, Islam, pemimpin dikenal dengan istilah *imam*, *amir* atau *sultan*, *ulī al-amr*, dan *wulatul amr*. Kepemimpinan sendiri dalam Islam identik dengan khalifah yang berarti wakil atau

¹ Muhammad Nor and Yeti Dahliana, "Epistemologi Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* Karya Sayyid Qutb," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Alqur'an* 6, no. 1 (2025): 152–74.

² Muhammad Kamran Sufi and Musarat Yasmin, "Racialization of Public Discourse: Portrayal of Islam and Muslims," *Heliyon* 8, no. 12 (2022).

³ Bambang Eko Turisno et al., "Beyond Textual Reform: A Semiotic and Feminist Critique of Indonesian Civil Code," *International Journal for the Semiotics of Law-Revue Internationale de Sémiotique Juridique*, 2025, 1–31.

⁴ Lujeng Lutfiyah and Lubabah Diyanah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 270–87.

pengganti.⁵ Istilah lainnya yang cukup populer untuk pemimpin adalah *Uli al-Amr*, yakni orang yang memiliki kemampuan dalam memerintah sesuai dengan pengetahuan Ilahi, yang telah didelegasikan wewenang membuat keputusan untuk menentukan kebijakan, aturan dan hukum.⁶

Kondisi ini tidak hanya menjadi wacana di ruang akademik, tetapi juga merembes ke dalam kebijakan dan praktik sosial. Contohnya, dalam beberapa pemilihan kepala daerah di Indonesia, calon perempuan mendapat penolakan dari kelompok konservatif dengan dalih bahwa seorang perempuan tidak layak menjadi pemimpin di ranah publik. Penolakan ini acap kali tidak didasarkan pada *dalil qat'i*, melainkan pada tafsir-tafsir yang eksklusif dan selektif terhadap teks Al-Qur'an.⁷

Fenomena tersebut menegaskan urgensi untuk membaca ulang tafsir-tafsir Al-Qur'an secara kontekstual, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti gender dan kepemimpinan. Tafsir tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dan pengalaman historis sang penafsir.⁸ Oleh karena itu, menelaah ulang tafsir Qutb dalam kasus kisah Balqis memberikan ruang penting untuk menggugat asumsi-asumsi ideologis yang selama ini dianggap teologis.

Lebih lanjut, pendekatan tafsir yang ideologis tersebut berpotensi tetap mendominasi laki-laki dalam struktur sosial Islam. Hal ini menjadi pertentangan dengan semangat universal Al-Qur'an yang menjunjung prinsip keadilan dan musyawarah. Dalam konteks ini, kisah Ratu Balqis sebenarnya dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan Al-Qur'an terhadap kapasitas kepemimpinan perempuan sesuatu yang belum banyak disorot dalam literatur tafsir tradisional.⁹

Perlu dicatat bahwa *Fi Zhilal al-Qur'an* ditulis dalam kondisi politik yang sangat represif, yakni saat Qutb mengalami penahanan dan tekanan dari rezim Mesir. Hal ini tentu berpengaruh terhadap narasi yang dibangun dalam tafsirnya, termasuk pemahamannya terhadap stabilitas sosial dan peran gender yang ideal menurutnya.¹⁰

Dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat tentang Balqis, Qutb menyampaikan kekaguman atas kecerdasan perempuan itu, namun ia segera mengalihkan sorotan kepada kebijaksanaan Nabi Sulaiman sebagai pemimpin yang "meluruskan" pemahaman Balqis tentang tauhid dan otoritas

⁵ Nur Fazillah, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam," *Intelektualita* 12, no. 1 (2023): 112–32.

⁶ Mohammad Eisa Ruhullah and Thameem Ushama, "Leadership in Islam: A Spiritual and Theological Doctrine," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2025): 54–74.

⁷ Marla Tri Andini, Suci Alima Sundari, and Gustiya Sunarti, "Kehujjahan Dan Karakteristik Hukum Dalam Al-Qur'an: Analisis Epistemologis Atas Dalil *Qath'i Dan Zhanni*," *Jurnal Pemikiran Islam Dan Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2025): 1–10.

⁸ Desi Hasninadia and Farid Rifaldi, "Analisis Metode Dan Corak Penafsiran Kiai Shaleh Darat Dalam Tafsir *Faidh Ar-Rahman* Melalui Hermeneutika Sosio-Historis Fazlur Rahman," *Mufassir: Jurnal Ilmu Tafsir Dan Studi Al-Qur'an* 1, no. 1 (2025): 162–85.

⁹ Salman Alfarisi and M Khairul Arwani, "A Critical Analysis of the Inconsistencies in Amina Wadud Gender Equality Movement in the Islamic World," *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 3, no. 1 (2024): 37–47.

¹⁰ Ahmad Syukron et al., "The Relationship Between Islam and the State in the Qur'an: Sayyid Qutb's Perspective on Islamic Political Governance," *QOF* 8, no. 2 (2024): 285–300.

kenabian. Ini memperlihatkan kecenderungan untuk melemahkan posisi perempuan sebagai pemimpin dalam narasi Al-Qur'an.

Konsep-konsep dalam tafsir Qutb tidak dapat dilepaskan dari semangat perlawanan terhadap sistem kolonialisme. Dalam semangat itu, Qutb membangun pola pikir yang menjadikan laki-laki sebagai agen utama perubahan. Perempuan lebih diposisikan sebagai penjaga moral keluarga dan pendukung dakwah domestik, bukan sebagai aktor utama dalam perubahan sosial.¹¹

Sedangkan, Muhammad Thahir bin Asyur, seorang mufassir kontemporer dari Tunisia, dalam *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, memberikan penafsiran progresif terhadap kisah Ratu Balqis. Sebagai mufassir yang dikenal dengan pendekatan maqashidi dan linguistiknya, Ibnu Asyur tidak hanya menekankan makna literal teks, tetapi juga makna kontekstual dan filosofis di balik ayat-ayat Al-Qur'an.¹²

Dalam tafsirnya, Ibnu Asyur memaknai kepemimpinan Ratu Balqis sebagai bentuk aktualisasi perempuan dalam ruang kekuasaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Beliau memandang bahwa tidak ada peringatan atau celaan terhadap Ratu Balqis dalam Al-Qur'an, bahkan justru menampilkan proses kepemimpinan yang demokratis dan rasional. Hal ini membantah asumsi bahwa Al-Qur'an menolak secara mutlak kepemimpinan perempuan.¹³

Ibnu Asyur mengangkat kualitas kepemimpinan Balqis melalui ketajaman strategi politik, kehati-hatian diplomatik, dan kepekaan spiritualnya. Ia juga mencermati bahasa dan struktur ayat-ayat dalam surah An-Naml untuk menunjukkan bahwa Balqis tidak digambarkan sebagai sosok yang lemah atau emosional, melainkan sebagai pemimpin visioner yang mampu menyelamatkan kaumnya dari kehancuran dan membawanya kepada tauhid.¹⁴

Penafsiran Ibnu Asyur menjadi penting karena ia mengembalikan narasi Al-Qur'an kepada semangat utamanya yaitu keadilan, rasionalitas, dan kemaslahatan umat. Dengan membaca pendekatan maqashidi, ia melihat bahwa kepemimpinan bukan soal kelamin, melainkan soal siapa yang kompeten dan mempunyai integritas moral. Oleh karena itu, tafsirnya sangat relevan dalam konteks kekinian yang selalu memperjuangkan keadilan gender dalam ruang publik.

¹¹ Abdul Bari, Hasan Muhammad Alfatih, and Asep Abdul Muhyi, "Islamic Understanding of Feminism and Gender: Between Tradition and the Pressures of the Age:(Pemahaman Islam Tentang Feminisme Dan Gender: Antara Tradisi Dan Tekanan Zaman)," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 3 (2024): 413–26.

¹² Zaenatul Hakamah, Dhiya Atul Millah, and Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, "Peran Tafsir Maqashidi Ibn Asyur Dalam Meredam Radikalisme: Studi Kasus Ahok Dan Polaritas Masyarakat," *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik* 2, no. 4 (2024): 195–205.

¹³ Jahira Salsabila Nurul Imam and Komarudin Soleh, "Stylistic Analysis on the Story of the Qur'an: Study of the Story of the Queen of Saba in An-Naml Verses 20-44," *Journal of Ulumul Qur'an and Tafsir Studies* 2, no. 1 (2023): 31–50.

¹⁴ Azizah Nurul Hidayati, Safria Andy, and Siti Ardianti, "Cinta Dan Kasih Sayang (Mahabbah) Dalam Kisah Nabi Sulaiman Dan Ratu Bilqis: Analisis Surah An-Naml Ayat 27-44 Berdasarkan Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Jailani," *Mesada: Journal of Innovative Research* 3, no. 1 (2026): 84–92.

Sejarah Islam telah menunjukkan beberapa tokoh perempuan yang telah menjadi seorang pemimpin, seperti Ratu Balqis yang digambarkan sebagai pemimpin perempuan yang membawa rakyatnya pada kesejahteraan hingga negeri Saba' disebagai negeri yang subur.¹⁵ Beliau juga seorang ratu yang namanya diabadikan dalam *QS. An-Naml*. Selain itu, Siti Aisyah istri Rasulullah juga pernah menjadi panglima perang. Hal ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Hal serupa disampaikan oleh Yanggo dalam penelitiannya bahwa perempuan diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin¹⁶ Dalam kaitannya dengan kajian gender, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam diskursus keilmuan tentang peran perempuan dalam Islam. Terutama dalam menjembatani gap antara pendekatan tafsir klasik yang normatif dengan pendekatan kontekstual yang bersifat interpretatif dan reflektif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga secara praksis, karena dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan keagamaan dan sosial yang lebih adil gender. Ini penting di tengah meningkatnya partisipasi perempuan dalam ruang publik dan tantangan konservatisme religius yang masih kuat. Penelitian ini juga merespons kekhawatiran akan pemanfaatan tafsir untuk kepentingan politik kekuasaan, yang sering kali dilakukan tanpa telaah mendalam terhadap konteks asal penafsiran. Ini menjadi penting dalam menjaga integritas tafsir sebagai ilmu keislaman yang kritis dan konstruktif.¹⁷

¹⁵ Poppy Setiawati et al., "Islam Dan Kepemimpinan Perempuan: *Prototipe Leadership* Ratu Balqis Perspektif *Tafsir Al-Azhar*," *Al-Qudwah* 2, no. 2 (2024): 137–51.

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam," *Misykat* 01, no. 01 (2016): 1–18.

¹⁷ Abd Ghazali, "Moqsith' Argumen Pluralisme Agama," *Depok: KataKita*, 2009.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks dan pemikiran tafsir terhadap kisah Ratu Balqis dalam QS. an-Naml [27]: 22–44. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif-kritis, yaitu membandingkan penafsiran dua mufassir, Sayyid Qutb dalam *Fī Zilāl al-Qur’ān* dan Ibnu ‘Āsyūr dalam *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta gap epistemologis dalam memahami kepemimpinan perempuan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari karya tafsir *Fī Zilāl al-Qur’ān* karya Sayyid Qutb dan *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu ‘Āsyūr yang secara spesifik menafsirkan ayat-ayat tentang Ratu Balqis.¹⁸ Adapun data sekunder berasal dari artikel jurnal akademik, khususnya jurnal-jurnal di lingkungan UIN yang membahas tafsir, gender, dan kepemimpinan perempuan dalam Islam.¹⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan mengklasifikasi teks-teks tafsir serta literatur pendukung yang relevan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger yang meliputi tiga tahapan dialektis: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.²⁰

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan langkah: (1) mendeskripsikan penafsiran masing-masing tokoh terhadap kisah Ratu Balqis; (2) mengkaji latar belakang sosial-intelektual yang memengaruhi penafsiran; (3) membandingkan keduanya untuk menemukan titik temu dan perbedaan; serta (4) mengidentifikasi gap penafsiran terkait isu kepemimpinan perempuan dalam perspektif tafsir klasik dan kontemporer. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pembacaan yang lebih kontekstual dan kritis terhadap wacana kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur’an.

¹⁸ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Shurūq, 1984); Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 19 (Tunis: Dār Sahnūn, 1997).

¹⁹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Gender dan Kepemimpinan dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Musawa UIN Sunan Kalijaga* 12, no. 1 (2013); Nurjannah Ismail, “Perempuan dan Kepemimpinan dalam Tafsir Al-Qur’an,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis UIN Sunan Kalijaga* 17, no. 2 (2016).

²⁰ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksternalisasi Sayyid Qutb dan Ibnu Asyur Terhadap Kepemimpinan Ratu Balqis

Kerangka teoritik yang digunakan dalam pembahasan ini merujuk pada teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger, khususnya pada konsep eksternalisasi. Dalam kerangka ini, eksternalisasi dipahami sebagai proses ketika individu mengekspresikan pemahaman subjektifnya ke dalam bentuk realitas yang tampak objektif melalui tindakan dan bahasa. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus karena manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial yang menuntut penyesuaian serta pemberian makna terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalam konteks ini, tafsir Al-Qur'an sebagai hasil pemikiran manusia juga merupakan bagian dari proses eksternalisasi, karena dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, serta konteks sosial penafsir.²¹

Dalam studi tafsir, eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses ketika mufassir membawa horizon pemikiran, pengalaman historis, dan kepentingan ideologisnya ke dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Proses ini kerap berlangsung secara tidak disadari, sehingga tafsir yang dihasilkan tampak seolah-olah bersifat objektif dan normatif. Namun, jika ditelaah lebih jauh, di baliknya terdapat konstruksi sosial yang cukup kuat. Oleh karena itu, membaca tafsir melalui pendekatan eksternalisasi menjadi penting untuk mengungkap dimensi sosial yang tersembunyi.²²

Kisah Ratu Balqis dalam QS. An-Naml ayat 22–44 menjadi locus strategis untuk analisis eksternalisasi karena Al-Qur'an menampilkan figur perempuan sebagai pemimpin politik yang berdaulat. Balqis digambarkan sebagai sosok yang memimpin kerajaan besar dengan kekuatan ekonomi yang kuat serta sistem pemerintahan yang tertata. Ia juga ditampilkan sebagai pemimpin yang rasional, berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan mengutamakan musyawarah. Meski demikian, Al-Qur'an tidak secara eksplisit memberikan penilaian normatif terhadap kepemimpinan perempuan tersebut. Ketiadaan penilaian normatif inilah yang membuka ruang interpretasi luas bagi mufassir. Kisah Ratu Balqis menjadi medan kontestasi makna, di mana

²¹ M. Arif Hidayat, *Teori Konstruksi Sosial dalam Studi Tafsir Al-Qur'an*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 42.

²² Abdul Hafith and Subhan Abdullah Acim, "Modernitas Kontemporer Dan Prospeknya Dalam Islam (Berdasarkan Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Islam & Modernity)," *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 2 (2025): 157–67.

berbagai kepentingan ideologis dan konstruksi sosial mufassir dapat dieksternalisasikan. Dalam konteks ini, tafsir tidak hanya berperan sebagai upaya menjelaskan teks, tetapi juga menjadi sarana untuk melegitimasi nilai-nilai sosial tertentu, termasuk pandangan mengenai kepemimpinan perempuan.

Sayyid Qutb menafsirkan kisah Ratu Balqis dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* dengan membawa latar sosial-politik Mesir abad ke-20 yang penuh dengan ketegangan ideologis. Situasi represif di bawah rezim nasionalis-sekuler, serta pengalaman Qutb sebagai aktivis *Ikhwanul Muslimin* dan tahanan politik, membentuk pandangan dunia yang kritis dan konfrontatif. Realitas ini menjadi fondasi eksternalisasi dalam tafsirnya.²³

Ibn 'Asyur hidup di masa negara Islam kebanyakan sedang mengalami kerusakan dan despotisme karena pengaruh pemikiran, budaya, dan militer Barat. Para musuh Islam seperti Perancis mengetahui bahwa kekuatan umat Islam terletak pada dua hal, yaitu: meyakini agamanya yang mendidik dari tipuan orang kafir dan Kesatuan negara Islam²⁴

Dalam tafsir Qutb, Nabi Sulaiman ditempatkan sebagai pusat transformasi sosial dan spiritual. Fokus narasi diarahkan pada keberhasilan dakwah tauhid dan ketundukan kekuasaan politik kepada otoritas kenabian. Dengan demikian, kisah Ratu Balqis dibaca terutama sebagai latar bagi afirmasi kepemimpinan profetik, bukan sebagai model kepemimpinan alternatif. Penekanan pada kepemimpinan profetik ini tidak dapat dilepaskan dari kuatnya konstruksi sosial patriarkal dalam pemikiran Sayyid Qutb. Dalam kerangka ideologi Islamisme yang ia anut, laki-laki ditempatkan sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial. Sementara itu, perempuan meskipun perannya tetap diakui cenderung ditempatkan pada posisi yang lebih subordinat. Pola pandang seperti ini kemudian terefleksi dan turut dieksternalisasikan dalam penafsirannya terhadap Al-Qur'an.²⁵

Dalam kerangka ini pula dapat ditelusuri akar cara pandang Qutb terhadap relasi gender dalam kisah tersebut. Qutb menampilkan Balqis sebagai figur yang memiliki kecerdasan dan

²³ Abu Sufyan, Mohammad Yunus, and Ibnu Burdah, "From Islamism to Neo-Islamism: Political Exegesis in Sayyid Qutb and Majd Makkī," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 15, no. 1 (2025): 133–54.

²⁴ Lutfiyatun Nikmah, Penafsiran Tāhir Ibn 'Āsyūr Terhadap Ayat-Ayat Tentang Demokrasi: Kajian Atas Tafsir *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*. *Journal Of Islamic Studies And Humanities* Vol. 2, No. 1 (2017) hlm 84

²⁵ Dhiyaa Thurfah Ilaa, "Feminisme Dan Kebebasan Perempuan Indonesia Dalam Filosofi," *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 3 (2021): 211–16.

kapasitas musyawarah, namun tetap ditempatkan dalam struktur kepemimpinan yang belum ideal sebelum tunduk pada kepemimpinan Nabi Sulaiman. Relasi Balqis Sulaiman bergerak dari otonomi politik menuju subordinasi teologis dalam sistem tauhid. Disinilah tampak bahwa eksternalisasi Qutb bukan hanya ideologis, tetapi juga menyentuh aspek elementer dalam memandang otoritas di mana legitimasi final berada pada kepemimpinan profetik laki-laki sebagai representasi sistem ilahi.

Secara sosiologis, pola ini dapat dibaca sebagai refleksi dari kesadaran normatif Qutb tentang tatanan sosial yang terstruktur secara hierarkis di bawah kepemimpinan ilahi. Relasi gender tidak dibahas secara eksplisit sebagai problem, namun secara implisit terbingkai dalam paradigma kepemimpinan yang berpusat pada figur nabi laki-laki sebagai puncak otoritas. Dengan demikian, bias gender jika dapat disebut demikian bukan hadir sebagai pernyataan langsung tentang inferioritas perempuan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari konstruksi teologis-ideologis yang menempatkan sistem tauhid dalam figur kepemimpinan profetik.

Berbeda dengan Ibnu Asyur yang mengeksternalisasikan paradigma maqāsidī dan rasionalitas reformisnya, Qutb mengeksternalisasikan pengalaman konflik ideologis dan visi haraki tentang transformasi masyarakat. Jika Ibnu Asyur membaca relasi Balqis–Sulaiman dalam horizon kemaslahatan dan deliberasi rasional, maka Qutb membacanya dalam horizon konversi sistem dan supremasi tauhid. Perbedaan ini menegaskan bahwa eksternalisasi dalam tafsir bukan sekadar latar belakang biografis, tetapi struktur kesadaran yang membentuk cara mufasir melihat otoritas, gender, dan legitimasi kekuasaan.

Berbeda dengan Sayyid Qutb, Ibnu Asyur mengeksternalisasikan latar intelektualnya sebagai ulama reformis dan pemikir maqashid al-syari‘ah ke dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. Ia hidup dalam konteks kolonialisme Prancis di Tunisia, yang menuntut respons intelektual terhadap tantangan modernitas dan rasionalitas Barat. Kondisi ini membentuk pendekatan tafsir yang sistematis dan kontekstual.²⁶ Ibnu Asyur memandang tafsir sebagai upaya memahami tujuan-tujuan syariat, bukan sekadar menegaskan norma literal. Oleh karena itu, ia menaruh perhatian

²⁶ Lutfiyatun Nikmah, “Penafsiran Tāhir Ibn ‘Āsyūr Terhadap Ayat-Ayat Tentang Demokrasi: Kajian Atas *Tafsir Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017): 79–103.

besar pada analisis kebahasaan, struktur ayat, dan konteks sosial. Pendekatan ini menjadi dasar eksternalisasi nilai-nilai rasionalitas dan kemaslahatan ke dalam tafsir Al-Qur'an.

Dalam menafsirkan kisah Ratu Balqis, Ibnu Asyur menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak memuat celaan terhadap kepemimpinan perempuan. Sebaliknya, teks justru menampilkan sosok pemimpin yang bijaksana, rasional, dan bertanggung jawab, yang menunjukkan bahwa Ibnu Asyur tidak membawa asumsi ideologis mengenai superioritas gender tertentu dalam penafsirannya. Hal ini semakin terlihat ketika ia mengaitkan kepemimpinan Balqis dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*, di mana kepemimpinan dipahami sebagai sarana untuk menjaga kemaslahatan umum sekaligus mencegah terjadinya kerusakan sosial. Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas etis dan intelektual yang dimiliki oleh seorang pemimpin.

Pendekatan Ibnu Asyur memperlihatkan upaya mendamaikan teks wahyu dengan realitas sosial yang berubah. Tafsir tidak diposisikan sebagai alat untuk melegitimasi struktur sosial tertentu, melainkan sebagai sumber nilai yang dapat membimbing masyarakat menuju keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan tidak dipandang sebagai sesuatu yang menyimpang secara teologis. Jika dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian, perbedaan antara Sayyid Qutb dan Ibnu Asyur menunjukkan bahwa eksternalisasi berperan besar dalam membentuk arah tafsir. Teks Al-Qur'an yang sama menghasilkan konstruksi makna yang berbeda karena masing-masing mufassir membawa konteks sosial dan ideologi yang berbeda pula.²⁷

Eksternalisasi Sayyid Qutb menghasilkan tafsir yang cenderung normatif-ideologis dan patriarkal. Sebaliknya, eksternalisasi Ibnu Asyur melahirkan tafsir yang lebih kontekstual dan inklusif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bias gender dalam tafsir sering kali berakar pada konstruksi sosial yang dimiliki oleh mufassir, bukan semata-mata berasal dari teks Al-Qur'an itu sendiri. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa tafsir Al-Qur'an memiliki dampak sosial yang cukup besar, karena tidak hanya memengaruhi cara umat memahami teks, tetapi juga membentuk cara pandang terhadap relasi gender dan kepemimpinan. Oleh karena itu, kritik terhadap proses eksternalisasi mufassir menjadi bagian yang penting dalam kajian tafsir kontemporer.

²⁷ Hjelm, "Rethinking the Theoretical Base of Peter L. Berger's *Sociology of Religion: Social Construction, Power, and Discourse*."

Dengan memahami eksternalisasi, pembaca dapat membedakan antara nilai normatif Al-Qur'an dan proyeksi ideologis mufassir. Pendekatan ini membantu membuka ruang bagi pembacaan Al-Qur'an yang lebih adil dan kontekstual, khususnya dalam isu kepemimpinan perempuan. Kisah Ratu Balqis, dalam kerangka ini, tidak lagi dipahami sebagai kisah historis semata, melainkan sebagai narasi terbuka yang terus diproduksi ulang maknanya dalam berbagai konteks sosial. Perbedaan tafsir atas kisah ini mencerminkan dinamika pemikiran Islam sepanjang sejarah.

Melalui analisis eksternalisasi Sayyid Qutb dan Ibnu Asyur, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada pengembangan studi tafsir yang lebih reflektif dan sadar konteks. Tafsir tidak lagi dipahami sebagai kebenaran tunggal, melainkan sebagai produk intelektual yang dapat dikaji dan dikritisi secara ilmiah.

2. Objektivikasi Sayyid Qutb dan Ibnu Asyur Terhadap Kepemimpinan Ratu Balqis

Jika pada sebelumnya eksternalisasi dipahami sebagai proses pencurahan dunia subjektif mufassir ke dalam tafsir, maka objektivikasi merupakan tahap ketika tafsir tersebut mengalami pembendaan, dilembagakan, dan diterima sebagai realitas objektif oleh masyarakat. Dalam kerangka teori konstruksi sosial Peter L. Berger, objektivikasi menjelaskan bagaimana produk pemikiran manusia tampil seolah-olah berdiri di luar subjek penciptanya.

Dalam konteks tafsir Al-Qur'an, objektivikasi terjadi ketika penafsiran tertentu tidak lagi dipahami sebagai pandangan personal mufassir, melainkan diterima sebagai kebenaran keagamaan yang mapan. Tafsir kemudian diajarkan, disebarluaskan, dan diwariskan melalui berbagai saluran seperti institusi pendidikan, kegiatan dakwah, serta literatur keislaman. Proses ini menjadikan tafsir memiliki otoritas sosial yang kuat dan berpengaruh dalam membentuk cara umat Islam memahami berbagai isu, termasuk kepemimpinan perempuan. Objektivikasi tafsir pun tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan melalui mekanisme sosial yang cukup kompleks, di mana otoritas keilmuan mufassir, konteks politik, serta tingkat penerimaan masyarakat turut menentukan tafsir mana yang menjadi dominan. Dengan demikian, objektivikasi tidak hanya berkaitan dengan isi tafsir itu sendiri, tetapi juga dengan relasi kuasa dan struktur sosial yang melatarbelakanginya.

Dalam konteks ini, tafsir Sayyid Qutb dan Ibnu Asyur terhadap kisah Ratu Balqis mengalami proses objektivikasi yang berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan posisi sosial kedua mufassir, karakter karya tafsir mereka, serta jaringan institusional yang mendukung penyebaran pemikirannya. Analisis objektivikasi menjadi penting untuk memahami bagaimana tafsir berfungsi dalam realitas sosial umat Islam. Dalam hal ini, objektivikasi penafsiran Sayyid Qutb tampak melalui penyebaran luas karyanya, *Fi Zhilal al-Qur'an*, di berbagai wilayah dunia Islam. Tafsir tersebut tidak hanya dibaca sebagai karya ilmiah, tetapi juga dipahami sebagai teks yang memiliki muatan ideologis dan turut menginspirasi berbagai gerakan Islam kontemporer. Posisi Qutb sebagai tokoh Ikhwanul Muslimin memberikan legitimasi tambahan terhadap tafsirnya, sehingga pandangannya mudah diterima sebagai kebenaran normatif.²⁸

Objektivikasi tafsir Qutb juga diperkuat oleh gaya penulisan *Fi Zhilal al-Qur'an* yang emotif, retorik, dan normatif. Gaya ini menciptakan kesan kepastian teologis dan kebenaran mutlak, sehingga pembaca cenderung menerima tafsir tanpa sikap kritis. Dalam konteks kepemimpinan perempuan, hal ini turut memperkuat pandangan patriarkal dalam wacana keislaman. Selain itu, objektivikasi tafsir Sayyid Qutb juga terlihat dari keterkaitannya dengan ideologi Islamisme, di mana penafsirannya kerap dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka normatif mengenai gambaran masyarakat Islam yang ideal. Dalam kerangka ini, kepemimpinan perempuan tidak diposisikan sebagai isu terbuka untuk ijtihad, melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial yang telah ditentukan.

Proses objektivikasi ini menyebabkan tafsir Qutb memiliki daya hegemonik yang kuat. Pandangannya tentang relasi gender dan kepemimpinan menjadi rujukan bagi banyak kelompok Islam kontemporer. Akibatnya, tafsir tersebut sering kali berfungsi sebagai legitimasi religius bagi praktik sosial patriarkal, meskipun Al-Qur'an sendiri tidak secara eksplisit melarang kepemimpinan perempuan.²⁹

Dengan demikian, objektivikasi penafsiran Sayyid Qutb berkontribusi pada pembentukan realitas sosial di mana kepemimpinan perempuan dipandang problematis atau tidak ideal. Tafsir tersebut tidak hanya berperan dalam membentuk wacana keagamaan, tetapi juga turut

²⁸ Ahmad Fauzan, "Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariati," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 35–58, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.356>.

²⁹ Bari, Alfatih, and Muhyi, "*Islamic Understanding of Feminism and Gender: Between Tradition and the Pressures of the Age*:(Pemahaman Islam Tentang Feminisme Dan Gender: Antara Tradisi Dan Tekanan Zaman)."

memengaruhi sikap sosial serta kebijakan yang diambil oleh berbagai organisasi Islam terhadap perempuan.

Berbeda dengan Sayyid Qutb, objektivikasi penafsiran Ibnu Asyur berlangsung dalam konteks yang lebih akademik dan institusional. Tafsir *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* diterima sebagai karya ilmiah otoritatif di lingkungan akademik dan ulama. Posisi Ibnu Asyur sebagai Syaikh al-Islam Tunisia memberikan legitimasi keilmuan yang kuat terhadap tafsirnya.³⁰

Objektivikasi tafsir Ibnu Asyur terjadi melalui penggunaannya dalam kajian tafsir, pengajaran di perguruan tinggi Islam, serta rujukan dalam diskursus maqashid al-syari'ah. Dalam proses ini, pandangan Ibnu Asyur tentang kepemimpinan perempuan yang bersifat netral gender dan berbasis kemaslahatan diterima sebagai pendekatan ilmiah yang sah dalam Islam.

Berbeda dari Qutb, objektivikasi tafsir Ibnu Asyur tidak bersifat ideologis-mobilisatoris, melainkan akademik-normatif. Tafsirnya tidak diarahkan untuk membangun gerakan politik tertentu, tetapi untuk memperkaya pemahaman umat terhadap tujuan-tujuan syariat. Oleh karena itu, pengaruh sosialnya bersifat gradual dan intelektual.

Objektivikasi tafsir Ibnu Asyur juga tampak dari penerimaannya dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Pendekatan maqashid yang digunakannya sering dijadikan landasan dalam pembahasan isu-isu modern, termasuk relasi gender dan kepemimpinan. Hal ini membuat tafsir Ibnu Asyur relevan dalam konteks pembaruan pemikiran Islam.³¹

Dalam konteks kepemimpinan perempuan, objektivikasi tafsir Ibnu Asyur membuka ruang legitimasi yang lebih luas. Kepemimpinan tidak lagi dipahami secara esensialis berdasarkan gender, melainkan secara fungsional berdasarkan kapasitas dan kemaslahatan. Tafsir ini berkontribusi pada terbentuknya realitas sosial yang lebih inklusif.

Jika dibandingkan, objektivikasi tafsir Sayyid Qutb dan Ibnu Asyur menunjukkan dua model pelebagaan makna yang berbeda. Qutb mengalami objektivikasi melalui gerakan dan ideologi, sementara Ibnu Asyur melalui institusi keilmuan dan diskursus akademik. Perbedaan ini memengaruhi cara tafsir mereka beroperasi dalam masyarakat.

³⁰ M I S Afrizal Nur, Mukhlis Lubis Lc, and Hamdi Ishak, "Sumbangan *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* Ibn 'Ashur Dan Relasinya Dengan *Tafsir Al-Mishbah* M. Quraysh Shihab," *Jurnal Al-Turath*; Vol 2, no. 2 (2017).

³¹ Isnain La Harisi and M Wahid Abdullah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif *Maqashid Syariah*," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41.

Objektivikasi yang bersifat ideologis cenderung menghasilkan kebenaran yang rigid dan sulit dikritisi. Sebaliknya, objektivikasi akademik membuka ruang dialog dan reinterpretasi. Dalam konteks ini, tafsir Sayyid Qutb cenderung dipahami secara lebih normatif, bahkan mendekati posisi dogmatis, sementara tafsir Ibnu Asyur lebih ditempatkan sebagai rujukan ilmiah yang terbuka untuk dikaji dan ditafsirkan kembali.

Analisis objektivikasi ini menunjukkan bahwa kekuatan suatu tafsir tidak hanya terletak pada isi teksnya, tetapi juga pada mekanisme sosial yang mendukungnya. Tafsir yang ditopang oleh struktur kekuasaan dan ideologi tertentu cenderung memiliki daya sebar serta pengaruh yang lebih luas. Hal inilah yang menjelaskan mengapa tafsir tertentu dapat menjadi dominan dalam wacana keislaman.

Objektivikasi tafsir juga berpengaruh terhadap proses internalisasi, baik pada tingkat individu maupun komunitas. Tafsir yang telah mapan sebagai realitas objektif cenderung diserap dan dijadikan pedoman dalam berperilaku oleh umat. Dalam konteks kepemimpinan perempuan, kondisi ini turut memengaruhi cara pandang sosial umat Islam terhadap peran perempuan di ruang publik.

Dengan demikian, objektivikasi menjadi tahap yang krusial dalam memahami bagaimana tafsir berperan dalam membentuk realitas sosial. Tanpa memperhatikan proses ini, analisis tafsir akan cenderung berhenti pada level teks dan mengabaikan dampak sosial yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, objektivikasi ditempatkan sebagai kunci untuk melanjutkan analisis dari tahap eksternalisasi.

3. Internalisasi Sayyid Qutb dan Ibnu Asyur Terhadap Kepemimpinan Ratu Balqis

Internalisasi menempati posisi yang sangat krusial dalam konstruksi sosial tafsir, pada fase inilah makna tafsir mengalami proses naturalisasi. Tafsir yang telah dilembagakan melalui otoritas keilmuan dan institusi keagamaan diterima sebagai sesuatu yang “sudah seharusnya demikian”. Akibatnya, umat Islam kerap tidak menyadari bahwa cara pandang keagamaan yang mereka miliki sebenarnya merupakan hasil dari proses sosial-historis tertentu. Dalam konteks kepemimpinan perempuan, internalisasi menentukan apakah perempuan dipandang sebagai subjek sosial yang sah dalam ruang publik atau justru sebagai pihak yang harus dibatasi perannya.

Dalam kajian tafsir Al-Qur'an, proses internalisasi tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa dan otoritas keagamaan. Tafsir yang disampaikan oleh tokoh berpengaruh serta disebarakan melalui jaringan dakwah yang luas cenderung lebih mudah diterima dan dihayati oleh umat. Oleh karena

itu, perbedaan posisi sosial Sayyid Qutb dan Ibnu Asyur turut berimplikasi pada cara penafsiran mereka diserap oleh masyarakat Muslim. Dengan demikian, analisis internalisasi menjadi penting untuk melihat bagaimana tafsir benar-benar memengaruhi kesadaran sosial umat.

Internalisasi penafsiran Sayyid Qutb terhadap kisah Ratu Balqis berlangsung melalui proses ideologisasi yang cukup kuat dan berkelanjutan. Karya *Fi Zhilal al-Qur'an* tidak hanya dipahami sebagai produk tafsir, tetapi juga sebagai rujukan normatif dalam membentuk visi masyarakat Islam. Penyebaran gagasan tersebut banyak terjadi melalui berbagai aktivitas keagamaan seperti kajian rutin, forum pendidikan Islam, serta jaringan dakwah, yang pada akhirnya membentuk cara pandang kolektif umat mengenai tatanan sosial yang dianggap ideal.³²

Melalui proses tersebut, pandangan Qutb tentang kepemimpinan perempuan diinternalisasi sebagai sikap keagamaan yang harus dijaga. Meskipun Qutb tidak secara eksplisit mengharamkan kepemimpinan perempuan, kerangka pikir yang dibangunnya cenderung menempatkan kepemimpinan publik sebagai wilayah maskulin. Kesadaran ini kemudian diserap oleh umat sebagai ajaran Islam yang baku, bukan sebagai hasil ijtihad yang terikat konteks sosial tertentu.

Internalisasi tafsir Sayyid Qutb juga diperkuat oleh narasi besar yang memosisikan modernitas Barat sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam. Dalam kerangka tersebut, isu emansipasi perempuan kerap dipandang sebagai produk Barat yang dianggap tidak sejalan dengan tatanan nilai dalam Islam. Akibatnya, kepemimpinan perempuan tidak hanya dipersoalkan secara teologis, tetapi juga secara ideologis, sehingga resistensi terhadapnya semakin menguat di tingkat kesadaran umat.

Dalam perspektif Berger, proses internalisasi semacam ini melahirkan apa yang disebut sebagai *taken-for-granted reality*, yaitu realitas sosial yang diterima begitu saja tanpa banyak dipertanyakan. Dalam kondisi ini, umat tidak lagi mengkritisi dasar teologis dari pembatasan peran perempuan, karena hal tersebut telah melebur dalam kesadaran kolektif. Pada titik ini, tafsir berfungsi sebagai legitimasi simbolik yang turut menopang keberlangsungan struktur sosial patriarkal dalam masyarakat Muslim.

Dampak internalisasi tafsir Sayyid Qutb dapat dilihat dalam sikap sosial maupun kelembagaan umat Islam terhadap kepemimpinan perempuan. Sejumlah komunitas dan organisasi Islam yang terpengaruh oleh pemikirannya menunjukkan kecenderungan untuk membatasi peran

³² Nurul Hidayah, "Pengaruh Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dalam Wacana Islamisme Modern," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 145.

perempuan dalam struktur kepemimpinan formal. Pembatasan tersebut kerap dibenarkan atas nama menjaga kemurnian ajaran Islam, meskipun dasar tekstualnya tidak selalu dinyatakan secara eksplisit.

Dalam kerangka komparasi kritis antara Sayyid Qutb dan Ibnu ‘Asyur, konsep *mawāni jibilliyyah* dapat digunakan sebagai instrumen analitis untuk membaca bagaimana masing-masing mufasir memposisikan perbedaan kodrati dalam struktur sosial Islam. Qutb dalam *Fī Zilāl al-Qur’ān* tidak secara eksplisit menggunakan istilah tersebut ketika menafsirkan kisah Ratu Balqis, namun konstruksi sosial yang ia bangun mengenai diferensiasi peran laki-laki dan perempuan menunjukkan kecenderungan normatif yang selaras dengan gagasan adanya pembeda kodrati dalam tatanan sosial. Dalam perspektif ini, perbedaan biologis dapat terintegrasi dalam sistem peran yang dianggap harmonis dan sesuai dengan fitrah penciptaan, sehingga berpotensi dipahami sebagai batas implisit dalam kepemimpinan publik.

Dengan demikian, internalisasi penafsiran Sayyid Qutb tidak hanya membentuk pola pikir pada tingkat individu, tetapi juga berpengaruh terhadap praktik sosial serta kebijakan dalam kelembagaan. Dalam hal ini, tafsir berperan sebagai kekuatan normatif yang turut mengarahkan tindakan kolektif umat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur’an memiliki implikasi sosial yang nyata dan berlangsung dalam jangka panjang.

Berbeda dengan Sayyid Qutb, internalisasi penafsiran Ibnu Asyur berlangsung melalui jalur akademik dan intelektual yang relatif lebih reflektif. Tafsir *Al-Tahrir wa Al-Tanwir* dipelajari dalam berbagai konteks, seperti pendidikan formal, diskursus ilmiah, serta kajian *maqashid al-syari’ah*. Melalui proses ini, umat diajak untuk tidak sekadar menerima tafsir sebagai sesuatu yang bersifat dogmatis, tetapi juga memahami tujuan-tujuan syariat serta konteks sosial yang melatarbelakangi teks.

Internalisasi tafsir Ibnu Asyur membentuk kesadaran keagamaan yang cenderung lebih rasional dan kontekstual. Dalam kerangka ini, kepemimpinan perempuan dipahami sebagai persoalan sosial yang perlu dilihat dari aspek kemaslahatan, kapasitas, serta situasi historis yang melingkupinya. Dengan demikian, tafsir Ibnu Asyur membuka ruang legitimasi yang lebih luas bagi perempuan untuk berperan dalam kepemimpinan di ranah publik.

Dalam pembacaan Sayyid Qutb, internalisasi berlangsung melalui reproduksi dikotomi tauhid–jahiliyah sebagai paradigma dasar dalam memahami relasi kekuasaan.³³ Kisah Balqis tidak

³³ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, jil. 5 (Kairo: Dar al-Shuruq, 2003), hlm. 2689–2696.

berhenti sebagai narasi historis, tetapi diinternalisasikan sebagai pelajaran tentang pentingnya transformasi sistem menuju tatanan ilahi. Dalam proses ini, relasi Balqis–Sulaiman dipahami sebagai model ideal peralihan dari kepemimpinan rasional yang belum berlandaskan tauhid menuju kepemimpinan profetik yang sepenuhnya tunduk pada sistem ilahi. Ketika paradigma ini diserap oleh pembaca, maka konstruksi otoritas yang berpusat pada figur kepemimpinan laki-laki profetik berpotensi menjadi norma yang diterima tanpa dipersoalkan ulang.

Di sinilah konsep *mawāni* (hambatan atau faktor penghalang) menjadi relevan dalam menganalisis proses internalisasi tersebut. *Mawāni* dapat dipahami sebagai faktor epistemologis, teologis, maupun kultural yang membatasi kemungkinan lahirnya pembacaan alternatif terhadap teks. Dalam konteks tafsir Qutb, hambatan tersebut dapat berupa kuatnya kerangka ideologis tauhid–jahiliyah yang membuat isu gender tidak tampil sebagai problem otonom, melainkan terserap ke dalam agenda besar transformasi sistem. Dengan demikian, kemungkinan membaca kepemimpinan Balqis sebagai legitimasi penuh atas otoritas politik perempuan menjadi terhalang oleh prioritas ideologis tersebut.

Sebaliknya, dalam tafsir Ibnu Asyur, proses internalisasi berlangsung melalui paradigma *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan rasionalitas, kemaslahatan, dan keadilan.³⁴ Kisah Balqis diinternalisasikan sebagai bukti bahwa kepemimpinan yang efektif ditentukan oleh kebijaksanaan, musyawarah, dan kemampuan membaca situasi politik, bukan oleh jenis kelamin semata. Namun demikian, *mawāni*‘ juga dapat muncul dalam bentuk tradisi sosial patriarkal yang hidup dalam masyarakat Muslim, yang sering kali lebih dominan daripada pendekatan rasional-*maqāṣidī* itu sendiri. Artinya, meskipun secara metodologis terbuka, internalisasi tafsir tetap berhadapan dengan hambatan budaya yang dapat membatasi penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan.

Internalisasi tafsir Ibnu Asyur juga tercermin dalam perkembangan wacana hukum Islam kontemporer yang semakin peka terhadap isu keadilan gender. Sejumlah pemikir Muslim modern mengadopsi pendekatan Ibnu Asyur dalam merespons berbagai tantangan sosial, termasuk persoalan kepemimpinan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi tafsir tidak selalu bersifat konservatif, tetapi juga dapat berperan sebagai pendorong terjadinya perubahan sosial.

³⁴ Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, jil. 19 (Tunis: Dar Sahnun, 1984), hlm. 168–174.

Internalisasi yang bersifat ideologis cenderung melahirkan sikap yang lebih resistif terhadap perubahan sosial, termasuk tuntutan kesetaraan gender. Sebaliknya, internalisasi yang berlandaskan *maqashid* membuka ruang bagi pembacaan ulang teks keagamaan secara lebih kontekstual. Dalam kerangka ini, tafsir Ibnu Asyur dapat dilihat memiliki potensi emansipatoris yang lebih besar.

Analisis internalisasi ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari cara tafsir diserap dan dihayati oleh umat. Teks Al-Qur'an yang sama dapat melahirkan bentuk kesadaran sosial yang berbeda, bergantung pada tafsir yang diinternalisasi. Oleh karena itu, kritik terhadap tafsir menjadi bagian penting dalam mendorong terjadinya transformasi sosial.

Dalam konteks kepemimpinan perempuan, internalisasi tafsir berperan dalam menentukan apakah perempuan dipandang sebagai aktor sosial yang setara atau sebagai pihak yang harus berada di bawah kontrol laki-laki. Perbedaan internalisasi Qutb dan Ibnu Asyur menunjukkan bahwa tafsir memiliki implikasi etis dan politis yang signifikan.

Dalam menafsirkan ayat *ar-rijālu qawwāmūna 'alā al-nisā'*, Sayyid Qutb menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga merupakan bagian dari tatanan sosial yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Ia memandang kepemimpinan tersebut bukan sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan, melainkan sebagai pembagian peran yang disesuaikan dengan fitrah masing-masing. Menurutnya, laki-laki memikul tanggung jawab sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena dinilai memiliki kesiapan fisik, psikologis, serta sosial yang lebih mendukung pelaksanaan peran tersebut.³⁵

Jika dianalisis melalui perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger, perbedaan penafsiran tersebut dapat dipahami sebagai hasil dari proses eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi yang dialami oleh kedua mufassir dalam konteks sosial dan intelektual mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak semata-mata ditentukan oleh teks, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang membentuk cara pandang penafsir dalam melihat realitas. Dengan demikian, pembahasan ini memberikan pemahaman bahwa tafsir Al-Qur'an merupakan proses yang dinamis dan tidak terlepas dari latar belakang sosial penafsir,

³⁵ Muhammad Abdul Ghoni Alhafizh, *Hak-Hak Wanita dalam Surat An-Nisa' (Analisis Penafsiran Manhaj Haraki Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Dzilalil Qur'an)* (Skripsi, Perguruan Tinggi Islam, t.t.), 72.

sekaligus membuka ruang dialog yang lebih luas dalam memahami wacana kepemimpinan perempuan dalam perspektif tafsir Al-Qur'an

C. SIMPULAN

Kisah Ratu Balqis dalam QS. an-Naml [27]: 22–44 menunjukkan bahwa Al-Qur'an menghadirkan figur perempuan sebagai pemimpin yang memiliki kapasitas politik, rasionalitas, dan kecakapan dalam mengambil keputusan. Baik Sayyid Qutb maupun Ibnu Asyur sama-sama mengakui kualitas kepemimpinan Balqis, terutama dalam aspek musyawarah, diplomasi, dan kehati-hatian dalam mengelola konflik. Temuan ini sejalan dengan kajian akademik di lingkungan UIN yang menegaskan bahwa karakter kepemimpinan Balqis mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan ideal seperti rasionalitas, konsultatif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Namun demikian, terdapat gap interpretatif yang signifikan antara kedua mufassir tersebut. Sayyid Qutb cenderung menempatkan kisah Balqis dalam kerangka teologis-ideologis yang berorientasi pada supremasi dakwah dan kepemimpinan profetik, sehingga kepemimpinan perempuan tidak diposisikan sebagai legitimasi normatif, melainkan sebagai bagian dari narasi ketundukan terhadap tauhid. Sebaliknya, Ibnu Asyur melalui pendekatan maqāṣidi melihat kisah Balqis sebagai indikasi bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Al-Qur'an tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas intelektual, moral, dan kemampuan dalam mengelola kekuasaan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh latar belakang metodologis dan konteks sosial mufassir. Dalam konteks ini, penafsiran Qutb merepresentasikan kecenderungan normatif-ideologis, sementara Ibnu Asyur mencerminkan pendekatan kontekstual yang lebih inklusif terhadap isu gender. Oleh karena itu, kisah Ratu Balqis tidak hanya berfungsi sebagai narasi historis, tetapi juga sebagai ruang dialektika tafsir yang memperlihatkan dinamika pemikiran Islam dalam merespons isu kepemimpinan perempuan di berbagai konteks zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzan. (2022). Makna simbolik ibadah haji perspektif Ali Syariati. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 11(1), 35–58. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.356>
- Alfarisi, S., & Arwani, M. K. (2024). A critical analysis of the inconsistencies in Amina Wadud gender equality movement in the Islamic world. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 3(1), 37–47.
- Andini, M. T., Sundari, S. A., & Sunarti, G. (2025). Kehujjahan dan karakteristik hukum dalam Al-Qur'an: Analisis epistemologis atas dalil qath'i dan zhanni. *Jurnal Pemikiran Islam dan Dinamika Sosial*, 1(2), 1–10.
- Bari, A., Alfatih, H. M., & Muhyi, A. A. (2024). Islamic understanding of feminism and gender: Between tradition and the pressures of the age. *Bulletin of Islamic Research*, 2(3), 413–426.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality*. Anchor Books.
- Dzuhayatin, S. R. (2013). Gender dan kepemimpinan dalam perspektif Islam. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(1).
- Fazillah, N. (2023). Konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam. *Intelektualita*, 12(1), 112–132.
- Fathurrosyid, F. (2016). Ratu Balqis dalam narasi semiotika Al-Qur'an. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 9(2).
- Ghazali, A. (2009). *Moqsith: Argumen pluralisme agama*. KataKita.
- Hafith, A., & Acim, S. A. (2025). Modernitas kontemporer dan prospeknya dalam Islam (berdasarkan pemikiran Fazlur Rahman dalam Islam & modernity). *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(2), 157–167.
- Hakamah, Z., Millah, D. A., & Satiadharmanto, D. F. (2024). Peran tafsir maqashidi Ibn Asyur dalam meredam radikalisme. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 2(4), 195–205.
- Hasninadia, D., & Rifaldi, F. (2025). Analisis metode dan corak penafsiran Kiai Shaleh Darat dalam Tafsir Faidh Ar-Rahman. *Mufasssir: Jurnal Ilmu Tafsir dan Studi Al-Qur'an*, 1(1), 162–185.
- Hidayah, N. (2021). Pengaruh tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dalam wacana Islamisme modern. *Jurnal Studi Islam*, 15(2), 145.
- Hidayati, A. N., Andy, S., & Ardianti, S. (2026). Cinta dan kasih sayang dalam kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 3(1), 84–92.

- Hjelm, T. (n.d.). Rethinking the theoretical base of Peter L. Berger's sociology of religion: Social construction, power, and discourse.
- Imam, J. S. N., & Soleh, K. (2023). Stylistic analysis on the story of the Qur'an: Study of the story of the Queen of Saba in An-Naml verses 20–44. *Journal of Ulumul Qur'an and Tafsir Studies*, 2(1), 31–50.
- Ismail, N. (2016). Perempuan dan kepemimpinan dalam tafsir Al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 17(2).
- Kamran Sufi, M., & Yasmin, M. (2022). Racialization of public discourse: Portrayal of Islam and Muslims. *Heliyon*, 8(12).
- Lutfiyah, L., & Diyanah, L. (2022). Kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an: Kajian tafsir tematik. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), 270–287.
- Nikmah, L. (2017). Penafsiran Tāhir Ibn 'Āsyūr terhadap ayat-ayat tentang demokrasi. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), 79–103.
- Nur, M. N., & Dahliana, Y. (2025). Epistemologi tafsir Fii Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutb. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 6(1), 152–174.
- Nur, M. I. S. A., Lubis, M., & Ishak, H. (2017). Sumbangan tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir Ibn 'Ashur dan relasinya dengan Tafsir Al-Mishbah. *Jurnal Al-Turath*, 2(2).
- Setiawati, P., Nur, A., Khairiah, K., & Amin, S. (2024). Islam dan kepemimpinan perempuan: Prototipe leadership Ratu Balqis perspektif tafsir Al-Azhar. *Al-Qudwah*, 2(2), 137–151.
- Sugitanata, A. (2017). Pembaharuan konsep kafa'ah dalam perkawinan. *Jurnal Keislaman*, 4(2), 9–15.
- Sufyan, A., Yunus, M., & Burdah, I. (2025). From Islamism to neo-Islamism: Political exegesis in Sayyid Qutb and Majd Makki. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 15(1), 133–154.
- Tahido Yanggo, H. (2016). Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam. *Misykat*, 1(1), 1–18.
- Thurfah Ilaa, D. (2021). Feminisme dan kebebasan perempuan Indonesia dalam filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 211–216.
- Turisno, B. E., et al. (2025). Beyond textual reform: A semiotic and feminist critique of Indonesian civil code. *International Journal for the Semiotics of Law*, 1–31.
- Qutb, S. (1984). *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Vol. 5). Dār al-Shurūq.
- Qutb, S. (2003). *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Vol. 5). Dār al-Shurūq.

Ibn ‘Āshūr, M. al-Ṭ. (1984). *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Vol. 19). Dār Sahnūn.

Ibn ‘Āshūr, M. al-Ṭ. (1997). *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Vol. 19). Dār Sahnūn.